

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahan merupakan sumber daya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti: sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Di bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada penyedia lahan pertanian yang cukup (Catur, 2010).

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari lahan fungsi budidaya. Keberadaannya sangat penting dalam menyokong ketahanan pangan baik untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun untuk di jual ke luar wilayahnya. Setiap tahun terjadi alih fungsi lahan pertanian rata-rata 1.000 hektar di Jawa Timur, diantaranya berupa lahan subur yang didukung irigasi semi teknis. Disamping itu, pertumbuhan penduduk yang dinamis pada saat ini menyebabkan keberadaan lahan pertanian terancam untuk kebutuhan lain seperti perumahan, jalan, industri dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan ketersediaan lahan pertanian menjadi berkurang (Maleha dan Susanto, 2006).

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dalam bidang pertanian di Indonesia. Satu hal yang mungkin tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan alih fungsi lahan adalah dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan tersebut. Penurunan produksi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan lebih bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki. Bagi sektor pertanian, lahan merupakan faktor produksi utama dan tak tergantikan (Maleha dan Susanto, 2006).

Indonesia sebagai negara agraris masih mengalami kesulitan dalam mengendalikan alih fungsi lahan karena jumlah penduduk dan pembangunan di bidang yang terus meningkat menyebabkan semakin besarnya kebutuhan ruang yang berdampak pada semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian. Apabila alih fungsi lahan pertanian terus meningkat tanpa pengendalian dan pengawasan yang tegas maka dapat mengganggu stabilitas kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan baik lokal maupun nasional. (Irawan, 2005).

Ketahanan pangan (*food security*) sangat erat kaitannya dengan persediaan pangan. Pangan merupakan komoditas penting dan strategis, karena posisinya sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Produksi pangan selama ini di dominasi dari hasil tanaman padi yang ditanaman di lahan sawah subur, baik (sawah irigasi dan tadah hujan). Dengan demikian bila konversi lahan terus meningkat maka dapat mengganggu produksi dan ketersediaan pangan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan sektor industri, dan perumahan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lahan pertanian. (Irawan, 2003)

Menurunnya luas lahan sawah dari waktu ke waktu, salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan. Data mengenai luas lahan sawah di Kabupaten Kediri dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Luas Lahan Sawah Kabupaten Kediri Tahun 2013-2016

No.	Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)
1.	2013	46.202
2.	2014	46.130
3.	2015	46.023
4.	2016	45.835

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kediri 2016

Kondisi peralihan fungsi lahan pertanian Kabupaten Kediri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri bahwa telah terjadi alih fungsi lahan pertanian selama 4 Tahun (2013-2016) yang sebagian besar menjadi perumahan. Pada Tahun 2016 total luas lahan pertanian 45.835 Hektare.

Kecenderungan menyusutnya tanah pertanian bisa dilihat dari perkembangan data luasan lahan per tahun, Tahun 2015 luas lahan pertanian di Kabupaten Kediri sebesar 46.023 Ha. Ada pengurangan luas lahan pada tahun tersebut sebesar 188 Ha. Bukan hanya pada Tahun 2015 menuju 2016 luas lahan pertanian yang berkurang, pada Tahun 2014 lahan pertanian sebesar 46.130 Ha. Sedangkan pada Tahun 2013 luas lahan sebesar 46.202 Ha. Pada kenyataannya, Kabupaten Kediri merupakan daerah yang subur sehingga termasuk lahan pertanian yang produktif.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, di Indonesia hal ini menjadi masalah besar dibandingkan negara lain, pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial, terutama penyediaan lahan untuk tempat tinggal, yang berakibat pada Alih fungsi lahan yang terus terjadi dan dapat menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian produktif. Data mengenai perkembangan penduduk Kabupaten Kediri dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2014	1 492 585
2.	2015	1 544 639
3.	2016	1 556 385

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Kediri Tahun 2016

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya konversi lahan yang begitu luas, maka diperlukan upaya pengendalian yang dapat mengontrol laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dengan menjadikan aspek daya dukung lingkungan dan ketersediaan lahan sebagai salah satu pertimbangan. Salah satu upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Konversi lahan mempunyai beberapa peraturan

yang tercantum di dalam undang-undang dasar Negara Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. UU No. 24 Tahun 1992 mengenai penyusunan RTRW harus mempertimbangkan budidaya pangan/Sawah Irigasi Teknis (SIT)
2. Kepres No. 52 Tahun 1989, mengenai pembangunan kawasan industri tidak boleh konversi SIT / tanah pertanian subur.
3. Kepres No. 33 Tahun 1990, mengenai pelarangan pemberian ijin perubahan fungsi lahan basar dan pengairan beririgrasi bagi pembangunan kawasan industri.
4. Pemerintah Indonesia menetapkan diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.
5. UU RI No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan untuk menjaga ketahanan pangan dalam rangka swasembada pangan.
6. Pasal 6 Ayat 8 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 terkait perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi, yang artinya melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.
7. Reformasi Agraria, menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan untuk kepentingan rakyat banyak.

8. Pembagian sertifikat tanah gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah untuk menyisir seluruh wilayah terdata melalui mekanisme sertifikasi secara keseluruhan.

Apabila alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Kediri terus meningkat, hal ini akan mengakibatkan menurunnya produksi dan produktivitas dari sektor pertanian, Penurunan ini akan berpengaruh pada ketersediaan pangan dan ketahanan pangan nasional. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap produksi pangan utama pajale (padi, jagung dan kedelai) yang secara tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan pangan provinsi Jawa Timur, serta memberikan saran dan solusi kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat. Berdasarkan alasan diatas mengenai alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Kediri, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisa kondisi tersebut dengan mengambil judul : **“Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Produksi Pangan Utama di Kabupaten Kediri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di ambil suatu permasalahan yang di susun secara sistematis, sehingga sasaran yang hendak di capai jelas, tegas, dan terarah dan memudahkan pemahaman masalah yang diteliti, sehingga penelitian ini sesuai dengan yang di harapkan, adapun rumusan masalah dalam hal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan produksi pangan utama, jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah petani, dan penggunaan lahan di Kabupaten Kediri, sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan alih fungsi lahan pertanian dalam kurun waktu 12 tahun terakhir yaitu 2005-2016?

2. Bagaimana dampak luas alih fungsi lahan pertanian terhadap perkembangan produksi pangan utama (padi, jagung dan kedelai) di Kabupaten Kediri?
3. Faktor-faktor potensial apa yang mempengaruhi luas alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kediri?
4. Bagaimana strategi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi perkembangan produksi pangan utama, jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah petani dan penggunaan lahan di Kabupaten Kediri sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 12 tahun terakhir yaitu 2005-2016.
2. Untuk menganalisis dampak luas alih fungsi lahan pertanian terhadap produksi pangan utama (padi, jagung dan kedelai) di Kabupaten Kediri.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor potensial yang mempengaruhi luas alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kediri.
4. Menganalisis strategi kebijakan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai wadah pembelajaran dan penerapan ilmu yang diperoleh selama di bangku

perkuliahan serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Manfaat Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan pengembangan penelitian dalam bidang yang sama di masa mendatang.

3. Manfaat Bagi Universitas

Hasil penelitian dapat menjadi tambahan pembendaharaan perpustakaan, sehingga dapat menjadi perbandingan bagi mahasiswa dalam menyusun penelitian ilmiah.

4. Manfaat Bagi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi pemerintah pusat atau daerah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian untuk menghindari terjadinya penurunan produksi pangan utama yang dapat mengancam ketahanan pangan.